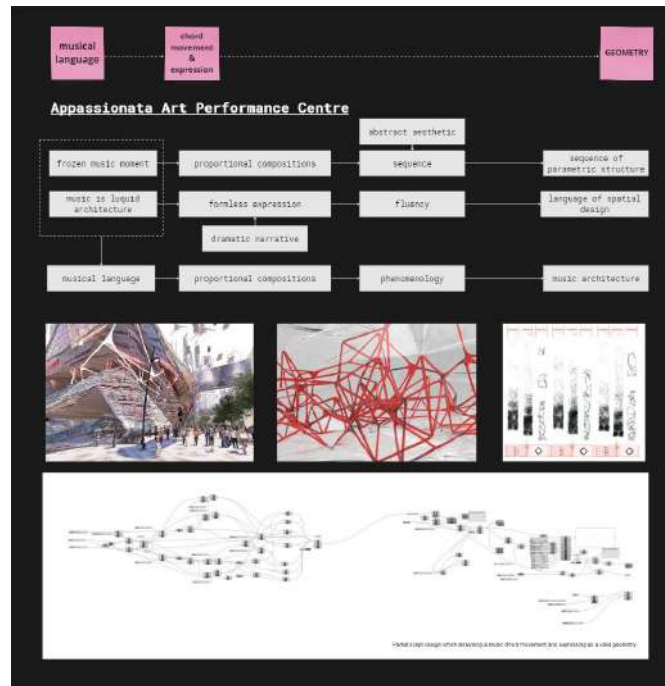




Gambar 2.10 Progres studi preseden Arsitektur melalui Musik
(Sumber: Analisis Penulis)

BAB III

TINJAUAN OBJEK, REFERENSI DAN LOKASI

3.1 Tinjauan Pengguna, Objek dan Lokasi

Untuk menerapkan perwujudan konsep arsitektur demokratis melalui sinestesia musik naratif sosial politik, dipilih objek tipologi sebuah arsitektur pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yaitu Kompleks Parlemen sebagai bentuk arsitektur dari fungsi legislatif. Perancangan Tugas Akhir ini kemudian berupaya untuk merancang sebuah alternatif desain perancangan Kompleks Parlemen di ibukota baru IKN, menerka satu kepentingan/keharusan untuk tetap merencanakan bangunan pemerintahan sesuai dengan ideologi demokrasi pada konteks yang dipindahkan. Maka diperlukan tinjauan secara

berhubungan terkait Kompleks Parlemen yang terikat pada konteks yaitu IKN dan penggunaannya yaitu Lembaga Legislatif MPR, DPR, dan DPD

3.1.1. Tinjauan Objek Perancangan Bangunan

Kompleks parlemen merupakan kompleks bangunan untuk Badan Legislatif melaksanakan tugasnya. Kompleks ini akan digunakan oleh lembaga lembaga negara legislatif pada sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini adalah MPR, DPR, dan DPD, yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perancangan bangunan kemudian menyesuaikan pengguna dan kebutuhan tiap-tiap lembaga negara dan secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas Legislatifnya.

Maka kemudian kriteria dan persyaratan objek dapat diambil intisarinnya dari regulasi yang mengatur tentang kebutuhan objek bangunan parlemen terkhusus di IKN. Hal-hal ini diatur dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Sayembara Komplek Legislatif dengan sasaran berikut:

- a. Didapatkan Konsep Perancangan Kawasan sebagai gagasan desain bangunan dan lingkungan yang bersifat menyeluruh sebagai sistem tata bangunan, untuk acuan kegiatan pengembangan basic design selanjutnya.
- b. Pengembangan desain kawasan Kompleks Perkantoran Legislatif diharapkan menjadi kantor yang smart, green, beautiful, and sustainable dengan mendukung Visi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP-IKN) sebagai model Kota Masa Depan Berbasis Hutan dan Kepulauan sebagai Simbol Transformasi dan Kemajuan Peradaban Indonesia
- c. Konsep Perancangan Memenuhi Indikator Kinerja Terukur/ Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Urban Design KIPP – IKN yaitu
 - 1) 10 menit pencapaian ke Fasum Fasos dan Titik Transit
 - 2) Memperhatikan ekologi dan Preservasi Lingkungan Alami dengan capaian 50 – 70% Area Terbuka Hijau
 - 3) 20-30% konservasi tanaman lokal Indonesia
 - 4) Penggunaan 70-80% Public Transport/ Model Share
 - 5) Kurang dari 500 m jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik
 - 6) Pencapaian Infrastruktur Kawasan cerdas
 - 7) Penggunaan energi alternatif

- 8) Ditunjang dengan Infrastruktur Teknologi Informatika yang advance dan mengimplementasikan teknologi masa depan dan lompatan teknologi.
- d. Adapun Implementasi KPI seperti pada point diatas dalam pengembangan bangunan diperlukan target-target khusus supaya terarah dan mempunyai tujuan yang sama antara lain:
- 1) Penempatan infrastruktur yang menunjang bangunan sehingga tercapai efisiensi infrastruktur dan tidak mengorbankan kenyamanan masyarakat
 - 2) Penempatan fasilitas bersama dengan jarak yang terjangkau 10 menit KPI target dalam suatu sub kawasan
 - 3) Penempatan hub-hub simpul transportasi di lokasi yang nyaman dan terjangkau sehingga terpenuhi kebutuhan transportasi dan pengurangan lahan parkir. Pengaturan blok-blok bangunan untuk mencapai keseimbangan area terbangun dan area hijau
 - 4) Pengaturan desain bangunan yang mengacu pada keselarasan lingkungan (green design)
 - 5) Penempatan jalur pedestrian di dalam bangunan yang tidak mengganggu penempatan blok bangunan dan tetap berfungsi secara efisien dan nyaman
 - 6) Pemilihan kualitas bangunan baik dari tata letak didalam dan diluar bangunan serta bahan bangunan yang digunakan

Secara umum, kriteria dan persyaratan perancangan Kompleks Parlemen dil dari KAK Sayembara Kompleks Perkantoran Legislatif pada IKN mencakup sebagai berikut:

- a. Dalam mewujudkan Kawasan dan Bangunan Kompleks Perkantoran Legislatif pada Ibu Kota Nusantara yang smart, green, beautiful and sustainable terdapat kriteria yang harus dipenuhi yaitu:
 - Desain harus mencerminkan Identitas Bangsa dalam desain Interior maupun Eksterior Bangunan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika);
 - Dalam perencanaan desain harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung Negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 dan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011;

- Penataan Kawasan harus dapat mewadahi penyampaian aspirasi masyarakat melalui penyediaan Plaza Panggung Demokrasi;
- Desain harus Menerapkan prinsip Kemudahan Gedung yang tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2021 meliputi hubungan ke, dari, dan dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Termasuk didalamnya mengakomodasi penyandang disabilitas;
- Desain Menerapkan prinsip Green Building dengan implementasi Permen PUPR No 21 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Menerapkan Prinsip Smart Building dalam pengelolaan fungsi-fungsi dalam Bangunan dengan menggunakan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan bangunan;
- Desain baru harus memenuhi persyaratan Keandalan Bangunan Gedung dengan memperhatikan bentuk site dan bangunan;
- Desain harus memperhatikan kondisi alam serta potensi resiko bencana baik gempa, longsor maupun kebakaran dan bencana lainnya sehingga mampu memenuhi setiap persyaratan mitigasi dan kenyamanan bagi setiap orang yang ada di dalamnya;
- Fungsi Perkantoran sebagai tempat perwakilan rakyat merupakan Kawasan perkantoran dengan bangunan yang berfungsi sebagai landmark Kawasan;
- Pada Fungsi ini bentuk bangunan didesain sehingga memiliki kesan monumental dengan elemen kuat dengan tetap berkarakter sebagai bangunan modern yang ramah lingkungan;
- Desain harus mampu memenuhi persyaratan keandalan bangunan (keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan);
- Bangunan yang mempunyai karakter yang selaras dengan bangunan utamanya sebagai bangunan penunjang, sehingga menjadi kesatuan kompleks dengan sekitarnya;
- Desain bangunan harus menjadi ciri khas baru dalam Ibu Kota Negara dengan desain yang mampu bertahan terhadap perkembangan zaman;
- Bangunan harus memenuhi KPI Ibu Kota Nusantara, khususnya terkait Bangunan Gedung dan Kawasan;
- Desain bangunan dan kawasan yang memperlihatkan fungsi dari tugas dan wewenang Lembaga Legislatif serta memperlihatkan satu sistem Lembaga Legislatif yang Kompak Dan dapat menjadi perwakilan dari Rakyat Indonesia;

- Zonasi yang didesain harus memudahkan sistem pengamanan namun juga memudahkan masyarakat umum dalam mengaksesnya;
 - Sirkulasi evakuasi
- b. Selain itu, seluruh bangunan pemerintahan di kawasan IKN menerapkan kriteria transformasi bekerja yang harus dipenuhi, yaitu:
- Bangunan Adaptif Kontur & Multi Akses;
 - Distrik Pemerintahan Berperforma Tinggi;
 - Budaya Bekerja Baru, yang Vibran dan Multi Layer;
 - Distrik Pemerintahan Berorientasi Lingkungan;
 - Mobilisasi Bekerja Cepat dan Terintegrasi;
 - Sistem Kontrol Kota yang Cerdas dan Terpadu;

c. Filosofi Bangunan

i. MPR

Anggota MPR merupakan simbol pemersatu bangsa dimana para negarawan beraktifitas haruslah mencerminkan nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gedung MPR termasuk dalam tipologi bangunan Governmental and Public yang memiliki fungsi-fungsi seperti perkantoran pemerintahan, pengelolaan negara dan juga melayani kepentingan masyarakat serta diperlukan gedung yang dapat merepresentasikan tempat yang menjadi rumah kebangsaan sesuai dengan visi MPR yaitu MPR menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat.

ii. DPR

Bentuk desain Arsitek Gedung Parlemen harus dibuat secara filosofis memberikan ciri Politik suatu negara serta cerminan kepribadian dan kebesaran Bangsa Indonesia yang dapat merefleksikan Peradaban Bangsa Indonesia masa lalu saat ini dan masa datang.

Kompleks Parlemen baru di IKN perlu memberikan gambaran Kawasan pikiran positif yang jernih bebas dari KKN dengan memperhatikan prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi filosofi Tata Ruang, penataan Gedung –

Gedung Parlemen harus diselaraskan dengan Tata Ruang Kawasan Parlemen yang terdiri dari Zona Karya dan Kerja; zona Simpul dan zona Rakyat – Publik.

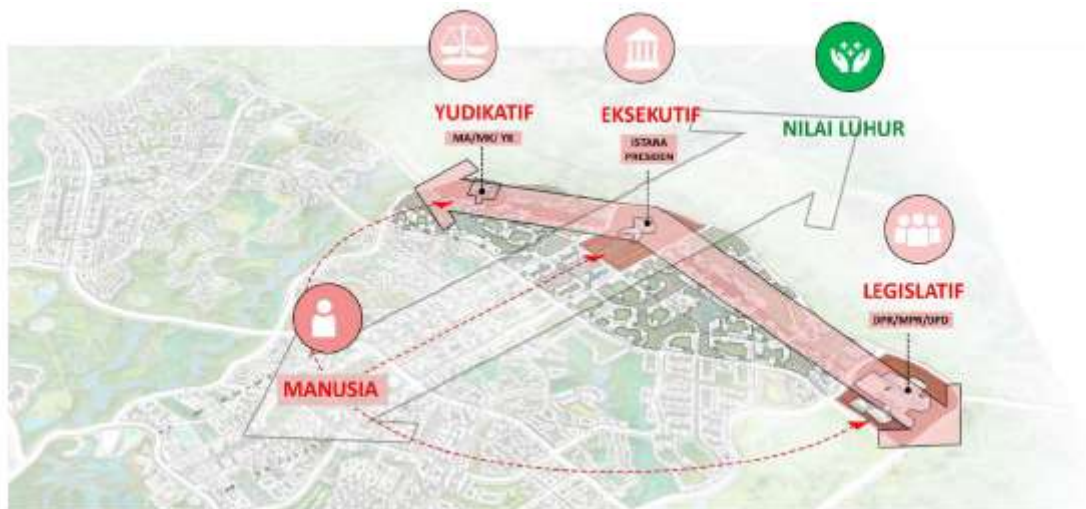
iii. DPD

Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi bagian dari Gedung Parlemen secara keseluruhan harus mencerminkan keterwakilan dan kesetaraan dari masyarakat dan daerah dari seluruh Indonesia.

Gedung DPD RI termasuk dalam tipologi bangunan Governmental and Public dimana memiliki fungsi-fungsi seperti perkantoran pemerintahan, pengelolaan negara dan juga melayani kepentingan masyarakat dan daerah. Gedung DPD RI diharapkan dapat mewujudkan visi DPD RI sebagai Parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik

3.1.2. Tinjauan Lokasi Perancangan Bangunan

Lokasi perancangan bangunan ini berada di Ibu Kota Nusantara, bersamaan dengan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sendiri akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut UU IKN Pasal 6, berikut letak ibu kota baru Indonesia secara geografis:



Gambar 3.5 Aksis Tripraja dan Aksis Kebangsaan
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

Sedangkan untuk lokasi pembangunan Kompleks Parlemen Legislatif berada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP-IKN). Berdasarkan dokumen Urban Design Development Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kompleks Parlemen Legislatif dan Yudikatif terletak pada Sumbu Tripraja yang melambangkan filosofi *Trias Politica* yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta merepresentasikan harmoni ketiganya dalam menjalankan pemerintahan berdampingan. Selain itu, pada struktur utama KIPP juga berlaku Sumbu Kebangsaan, membentang sejajar axis dari utara, yaitu istana presiden hingga ecopark di selatan.

Dalam perancangan tata guna lahan yang mendetail, fungsi pemerintahan menjadi pusat kegiatan utama Kawasan. Tak hanya Fungsi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tetapi pusat diplomatis dan pusat kegiatan ekonomi serta bisnis juga dirancang berdekatan. Perletakkan ruang public sangat terbatas dengan tujuan memberikan pengalaman ruang monumental saat bergerak pada area pemerintahan yang diwujudkan melalui elemen monument landmark atau grand boulevard serta dilengkapi dengan beberapa fungsi yang menunjang program nasional dalam bidang kebudayaan, keagamaan, dan sosial. Dalam Urban Design Development KIPP IKN, pembangunan juga perlu mengikuti visi IKN, Key Performance Indicator, dan pedoman Transformasi Berbudaya pada Ibu Kota Negara.

Visi Perancangan dan Pilar IKN



Gambar 3.6 Visi Perancangan dan Pilar IKN

(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)



Gambar 3.7 Key Performance Indicator KIPP IKN

(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun dokumen perencanaan Urban Design Development sebagai acuan dalam pembangunan Ibu Kota Negara menerapkan beberapa strategi desain yaitu :



Gambar 3.8 Strategi Transformasi Berbudaya IKN
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

1. Transformasi Bekerja

Bekerja dengan sistematis dan dinamis serta menjunjung tinggi kolaborasi dan keterhubungan antar semua pihak. Dengan menerapkan desain kompleks Pemerintahan yang terkonsolidasi dan terkoneksi antar bangunan, sehingga menciptakan ruang kolaborasi dengan bisnis, mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan people oriented serta high performance green office district.

2. Transformasi Bermukim

Kehidupan bermukim kota yang kompak berkinerja tinggi, efisien dan livable sehingga mewujudkan hunian Inklusif berbasis Komunitas.

3. Transformasi Mobilitas

Ibukota berbasis transit, mengutamakan pergerakan cepat, efisien dan sehat bagi warga kota yang ditunjang dengan 80% Transit transportasi publik, Iklim kondusif untuk pejalan kaki, serta mengadaptasi Smart Transport dan Autonomous System

4. Transformasi Melestarikan Lingkungan

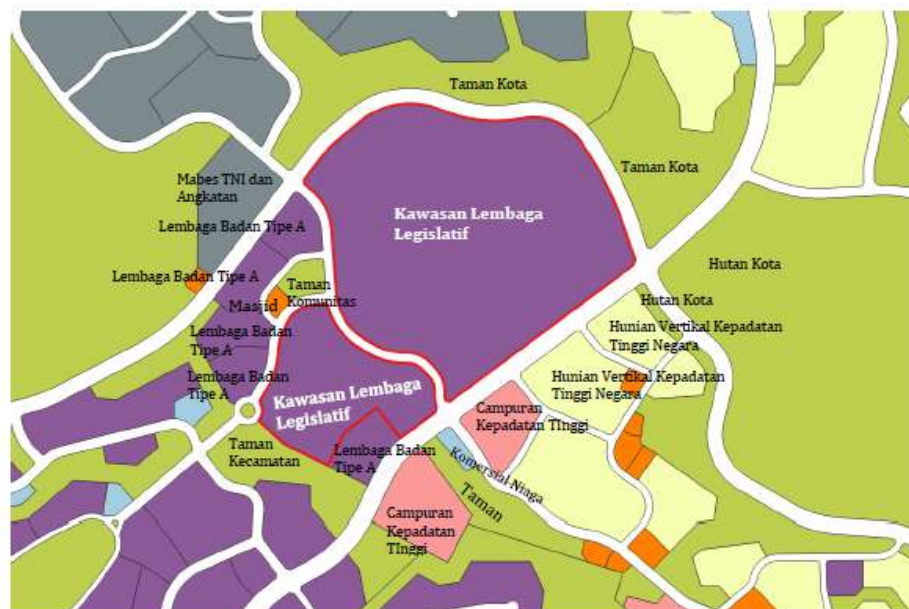
Usaha menjaga ekosistem alam dan hidup bersinergi dengan alam yaitu dengan meningkatkan kekayaan dan keragaman biota alami, menciptakan botanical garden dan International Center for Tropical Forestry, meningkatkan interaksi nilai –nilai lingkungan dan nilai – nilai luhur Pancasila

5. Transformasi Berbangsa dan Berbudaya

Kehidupan berbangsa dan berbudaya melalui ruang-ruang simbolis bersama untuk merayakan kesatuan dan kebhinekaan nusantara. Mewujudkan desain ruang representasi Budaya Nusantara di panggung nasional, ruang simbol kemajuan bangsa sebagai showcase kepada dunia, ruang perayaan kesatuan dalam keberagaman, dan ruang publik dan sarana edukasi sejarah.

3.1.3. Tinjauan Tapak Perancangan Bangunan

Di dalam Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan, lokasi Lembaga Legislatif termasuk dalam District Government 2 Blok 205. Tapak Kompleks Parlemen ini terbagi atas 2 persil dengan data-data tapak sebagai berikut:



Gambar 3.9 Peta persil tapak Kompleks Legislatif
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

DATA TAPAK

PERSIL 1			205.3
PRODUCT	OBJECT	BLOK	ID PERSIL
GOVERNMENT	2	05	1.G0.205.03
SARAN	-		

ATURAN WAJIB				
Zona	P	Pemerintahan		
Sub-Zona	P.1	Pemerintahan Nasional		
Program	P.1.09	MPR DPR DPD		
Tipologi Bangunan	T	Tunggal		
KDB	KLB	KDH	KB	KTB
25%	0.7	25%	-	25%
LUAS LAHAN		LUAS LANTAI		LUAS DASAR BANGUNAN
333.773 m2		235.041 m2		83.943 m2

PERSIL 2			205.01
PRODUCT	OBJECT	BLOK	ID PERSIL
GOVERNMENT	2	05	1.G0.205.01
SARAN	-		

ATURAN WAJIB

Zona	P	Pemerintahan		
Sub-Zona	P.1	Pemerintahan Nasional		
Program	P.1.09	MPR DPR DPD		
Tipologi Bangunan	T	Tunggal		
KDB	KLB	KDH	KB	KTB
25%	0.7	25%	-	25%
LUAS LAHAN		LUAS LANTAI		LUAS DASAR BANGUNAN
82.333 m2		57.633 m2		20.583 m2

Tabel 3.1 Matriks Data Persil Tapak

Dokumentasi Eksisting



Gambar 3.10 Dokumentasi Eksisting

(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

Data Slope

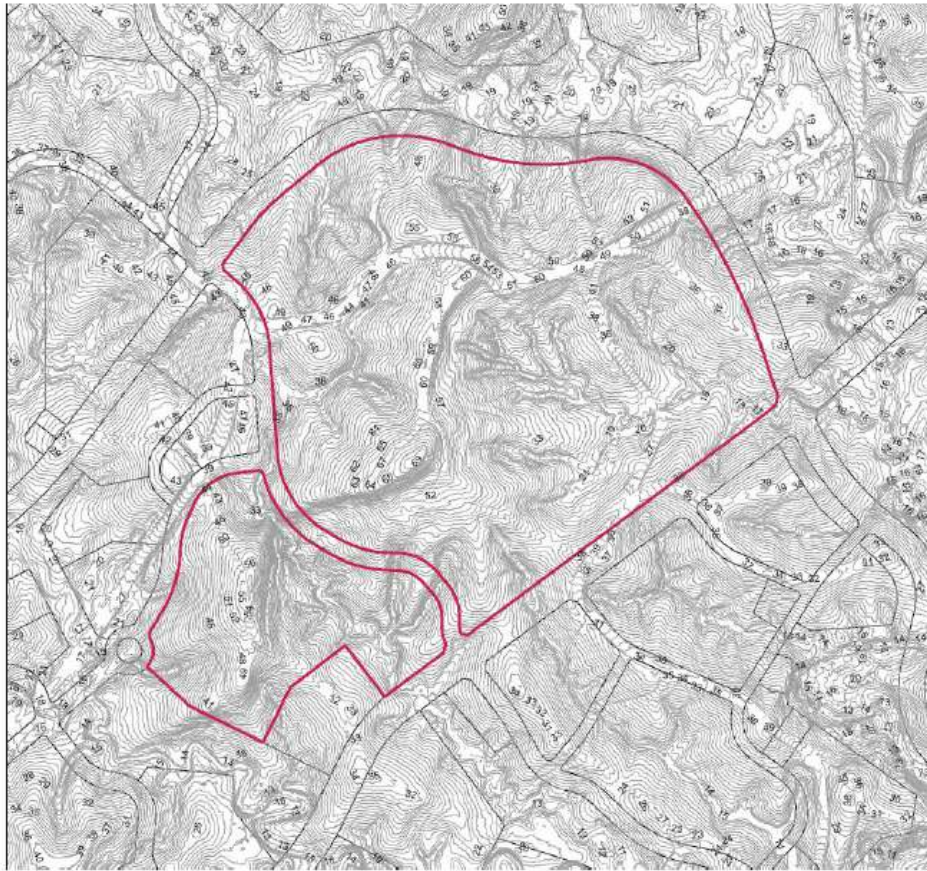


Gambar 3.11 Peta Kemiringan Lahan
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

Berdasarkan analisis menggunakan software ArGIS menggunakan basis data Foto Lidar, diperoleh peta analisis kemiringan lahan (slope).

Kategori kemiringan lahan yang lebih dari 45% dianjurkan untuk menjadi area ruang terbuka hijau dan tidak direkomendasikan pengembangan bangunan yang massif. Sementara kategori kemiringan lahan diantara 15-25% dan 25-45% dianjurkan dikembangkan dengan pendekatan adaptif terhadap kontur. Secara keseluruhan pengembangan dianjurkan pengembangan lahan dengan minimal grading dan pengembangan yang berorientasi pada lingkungan serta mewujudkan visi smart forest city.

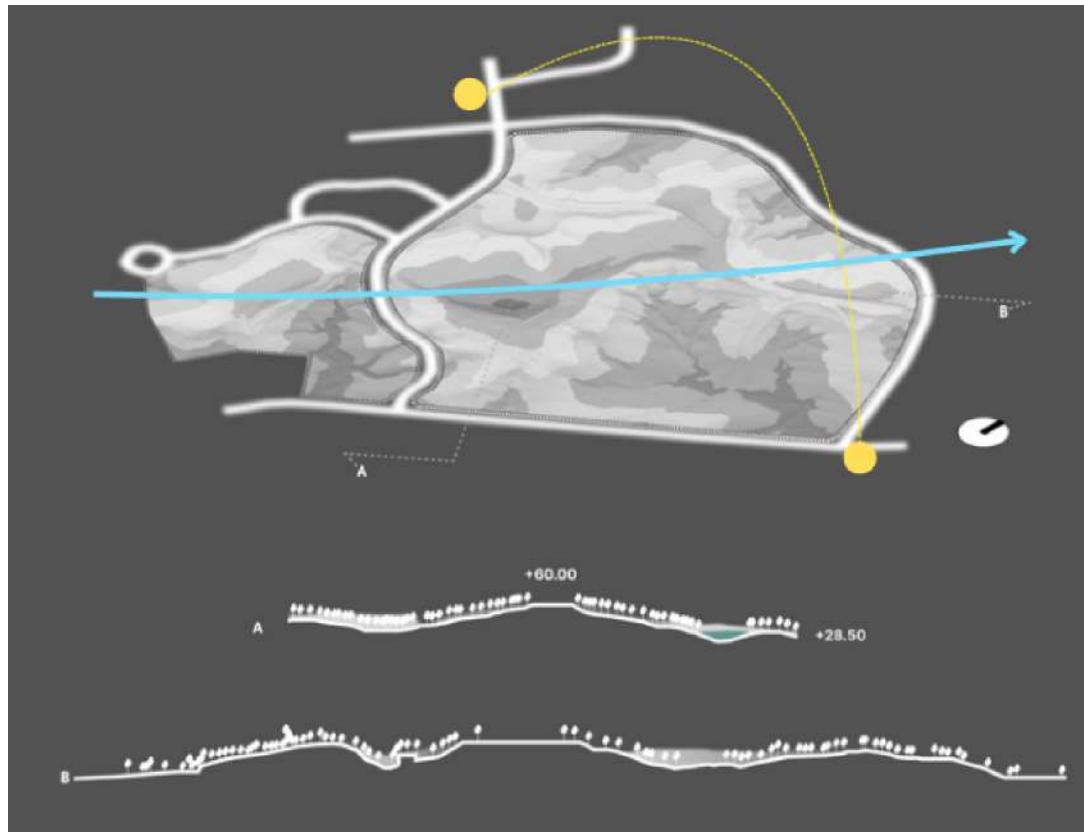
Peta Kontur



Gambar 3.12 Peta kontur tapak Kompleks Legislatif
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara)

Hasil simulasi menunjukkan pada area ini level tertinggi berada pada ketinggian 70 m. Sedangkan, level terendah berada pada ketinggian 10 – 20 m. Perletakan massa bangunan dianjurkan sebisa mungkin merespon kondisi kontur. Massa bangunan utama dapat diposisikan pada elevasi tertinggi sedangkan untuk sirkulasi internal lahan bisa merespon garis kontur sehingga meminimalisir grading.

Data Elevasi & Analisis Matahari + Angin



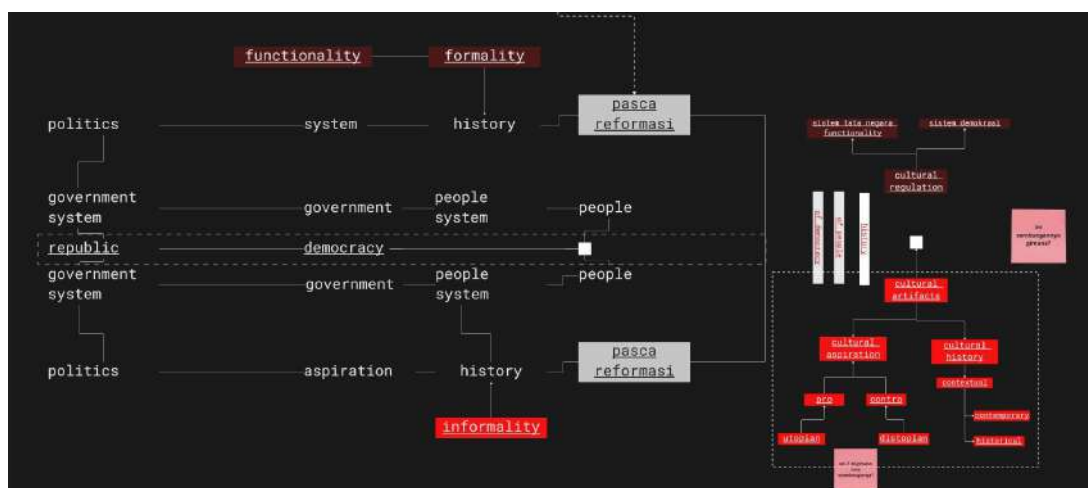
Gambar 3.13 Peta & Potongan Elevasi tapak Kompleks Legislatif
(Sumber: KAK Sayembara Kompleks Legislatif Nusantara & Analisis Pribadi)

Hasil simulasi menunjukkan pada area ini level tertinggi berada pada ketinggian 70 mdpl. Sedangkan, level terendah berada pada ketinggian 10 – 20 mdpl. Massa bangunan utama dianjurkan diposisikan pada level tertinggi dari persil sedangkan sirkulasi internal dianjurkan merespon kondisi kontur sehingga dapat meminimalisasi grading persi

3.2 Tinjauan Referensi: Objek Musik Naratif

Objek untuk melakukan proses analogi, metafora, dan semiotika pada model *psychology flexibility* melalui media sinestesia dalam menciptakan representasi pada sebuah arsitektur kemudian menjadi penting untuk dipilih. Proses dan metodologinya menghadirkan kriteria-kriteria musik yang signifikan, yaitu:

- Musik yang memiliki implikasi naratif
- Musik yang bertemakan sosial politik
- Musik yang narasinya berbasis konteks sosial politik
- Musik sebagai media ekspresi subjek informal, dalam hal ini adalah musik yang berasal dari rakyat, berisikan ekspresi dari sudut pandang rakyat tentang sebuah kondisi sosial politik
- Musik sebagai artefak kultural yang menjadi lawan dualitas formalitas



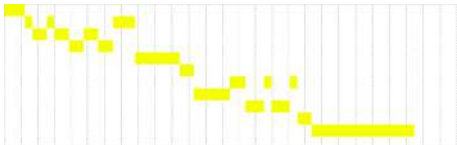
Gambar 3.10 Kriteria Informalitas Representasi Musik Naratif pada Konteks: Indonesia

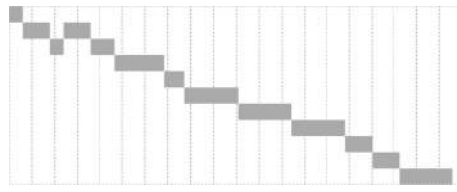
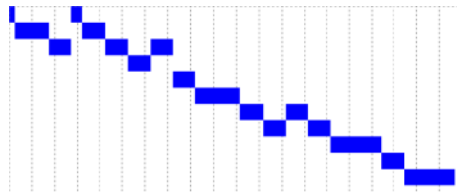
(Sumber: Analisis Penulis)

Dalam konteks perancangan bangunan pemerintahan di Indonesia, maka konteks kondisi sosial politik dikerucutkan pada masa-masa demokrasi pasca-reformasi, yang menjadi dinamika eksistensi demokrasi pancasila sampai saat ini. Dengan kriteria-kriteria dan menimbang konteks tersebut, maka dipilih produk musik berupa lagu-lagu dari subjek yaitu band lokal dalam negeri yang aktif berkarya sebagai media ekspresi sekaligus advokasi pada kondisi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan subjektivitas tersebut sekaligus *personal interest* penulis, lagu-lagu yang dibuat oleh band Efek Rumah Kaca dipilih sebagai objek musik naratif. Efek Rumah Kaca sendiri adalah grup musik indie yang berasal dari Jakarta. Band ini

Dalam perjalanan musiknya, Efek Rumah Kaca selalu menyisipkan dalam jumlah yang cukup dominan pesan-pesan politik melalui penggambaran kondisi sosial politik Indonesia dari sudut pandang rakyat. Dikutip dari penelitian Narasi Newsroom (2024), Efek Rumah Kaca konsisten menyalakan elan perlawanan, menjadi lentera untuk bersuara, dan menjadi manifesto pengharapan dari suatu kondisi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Lagu-lagunya seperti Di Udara (2007) merupakan tribute untuk sosok Munir, kemudian lantunan satir untuk praktik demokrasi yang kerap familiar dengan KKN dalam lagu Fun Kaya Fun (2023), sampai suatu pengharapan metaforik akan suatu negara demokrasi melalui lagu Seperti Rahim Ibu (2018). Karena jumlahnya yang cukup banyak, dengan musikalitas yang beragam, juga tema-tema dan metode penyampaian pesan politik yang bervariasi, maka perlu ditinjau kembali terhadap kriteria-kriteria yang sebelumnya dirumuskan. Dari tinjauan tersebut, 5 lagu pada album Sinestesia menjadi fokus objek penelitian musik naratif sebagai objek representasi.

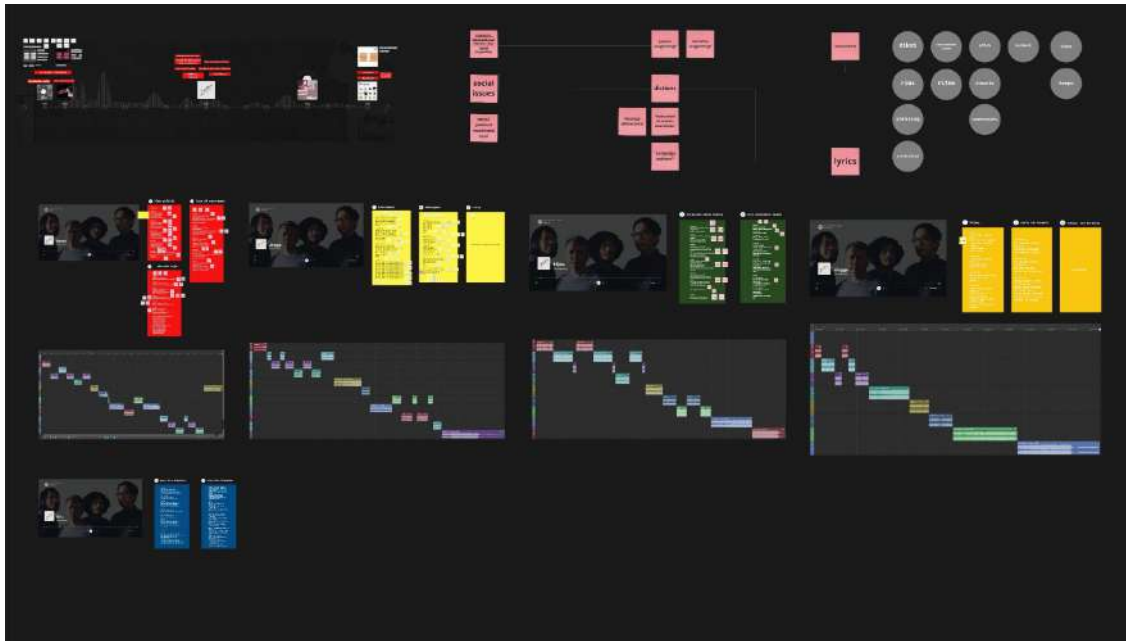
54

	Tahun Rilis: 2017 Kondisi Sosial Politik saat rilis: Masih menganut Sistem Demokrasi Pancasila & Demokrasi Representatif di era Modern.	
Lagu	Merah	Kuning
Durasi Lagu	11:14	12:16
Sekuens Naratif Lagu	3 Sekuens: - Ilmu Politik - Lara di Mana-mana - Ada-ada saja	3 Sekuens: - Keberagamaan - Keberagaman - Leleng
Pola Sekuens Naratif		
Representasi Sosial Politik	- Kesadaran atas pengharapan terhadap kondisi politik yang lebih baik - Kesadaran kolektif untuk menghadapi kondisi sosial politik yang buruk	- Kekeliruan perspektif ketuhanan dan keagamaan dalam konteks sosial yang seharusnya beriringan dengan cinta - Nilai kasih kebaikan universal di dalam keberagaman agama
Terkaan Nilai Demokrasi pada Representasi Makna Lagu		
Lagu	Hijau	Jingga
Durasi Lagu	7:33	13:26
Sekuens Naratif Lagu	2 Sekuens: - Keracunan Omong Kosong - Cara Pengolahan Sampah	3 Sekuens: - Hilang - Nyala Tak Terperi - Cahaya, Ayo Berdansa
Pola Sekuens Naratif		

Representasi Sosial Politik	- Keterbukaan dan keluasan pengetahuan untuk mengetahui omong kosong politik - dalam demokrasi pemikiran menjadi sampah yang perlu diolah - kemampuan mengubah hal pemikiran yg dianggap buruk menjadi baik	- Kegigihan perjuangan menuntut suatu kondisi sosial politik yang ideal - Menerka harapan dan energi positif dari suatu kondisi yang dianggap buruk/merugikan - Berdamai dan berdansa dari suatu gelap gulita
Terkaan Nilai Demokrasi pada Representasi Makna Lagu		
Lagu	Putih	Biru
Durasi Lagu	9:46	9:52
Sekuens Naratif Lagu	2 Sekuens: - Tiada - Ada	2 Sekuens: - Pasar Bisa Diciptakan - Cipta Bisa Dipasarkan
Pola Sekuens Naratif		
Representasi Sosial Politik	- pengingat bahwa kematian adalah bagian integral dari kehidupan yang tidak perlu ditakuti - pengingat akan netralitas dari segala kontras kehidupan yang mustahil dihindarkan - kelahiran sebagai pengharapan tentang penerus masa depan - mempertahankan kejujuran dalam keadaan apapun	- perspektif optimistik dalam prinsip kejujuran dan keinginan - kegigihan perjuangan hidup sampai akhirnya menuju titik akhir mulia

Terkaan Nilai Demokrasi pada Representasi Makna Lagu		
--	--	--

Tabel 3.2 Matriks Studi Referensi Musik Naratif



Gambar 3.11 Progres tinjauan objek musik naratif

(Sumber: Narasi.tv dan Analisis Penulis)

Obyek musik naratif ini kemudian akan menjadi objek untuk eksplorasi dalam merepresentasikan suatu kondisi sosial politik dinamis demokratis dalam suatu arsitektur demokratis secara informal melalui media sinestesia metafora, analogi, dan semiotika.